

KARIER PUSTAKAWAN DI MASA DEPAN

Blasius Sudarsono, MLS

Kepala PDII - LIPI

PENDAHULUAN

Apabila pertanyaan tentang cita-cita diajukan kepada siswa-siswa Sekolah Dasar, dapat diduga bahwa tidak seorangpun dari mereka yang memiliki cita-cita menjadi pustakawan. Mungkin mereka juga belum mengetahui keberadaan perpustakaan dan kegunaannya. Di kalangan para pencari kerja, banyak juga yang belum mengetahui profesi pustakawan. Mereka yang sudah mengetahui juga belum tentu bersedia bekerja di perpustakaan sebagai pustakawan. Bekerja sebagai pustakawan nampaknya masih merupakan pilihan terakhir. Ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan pustakawan belum dikenal masyarakat sebagai suatu profesi. Pustakawan yang saat ini sangat aktif, belum tentu sejak awalnya telah mengenal, memahami, dan menyukai profesi pustakawan. Penulis sendiri merasa pernah "terjebak" dengan pekerjaan ini. Namun setelah bertugas sebagai pustakawan lebih dari 21 tahun, penulis menyatakan bahwa tugas pustakawan merupakan profesi yang sangat strategis.

Dalam sistem administrasi kepegawaian negeri RI, pustakawan diakui sebagai salah satu jabatan fungsional yang memungkinkan pustakawan mencapai tingkat tertinggi dalam pangkat kepegawaian yang berlaku. Namun nampaknya justru pegawai negeri yang bertugas sebagai pustakawan belum semuanya berada dalam jabatan fungsional ini. Sedangkan unit perpustakaan walaupun ada, juga belum tentu dikelola oleh fungsional pustakawan. Perkembangan perpustakaan sangatlah pesat seiring dengan perkembangan kebutuhan akan informasi, perpustakaan diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan yang muncul di masyarakat (Chen, 1982). Peran perpustakaan dalam pembangunan nasional Indonesia telah menempati tempat khusus seperti diamanatkan oleh GBHN 1993 dan dijabarkan lebih rinci dalam Repelita VI. Pemahaman tentang ruang lingkup tugas perpusta-

kaan dan perkembangannya merupakan keharusan bagi seseorang yang meniti karir sebagai pustakawan. Kemampuan untuk melaksanakan fungsi strategis perpustakaan akan menjadikan pustakawan sebagai profesi terpadang di antara profesi lain yang ada.

PERPUSTAKAAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan nasional Indonesia telah memasuki babak baru dengan dimulainya tahap dua puluh lima tahun yang kedua (PJP II). Tujuan PJP II (1994-1999) adalah untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin sebagai landasan tahap pembangunan berikut menuju masyarakat adil dan makmur. Sasaran umum PJP II adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Fungsi dan peran perpustakaan dalam Program Pembangunan Nasional Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Pengembangan unit dokumentasi dan informasi termasuk *perpustakaan* telah mendapat arahan yang jelas di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, khususnya dalam Bidang Iptek. GBHN 1993 menyebut :

Kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hasil penelitian perlu ditingkatkan melalui publikasi dan pengembangan pelayanan dokumentasi dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta perpustakaan di seluruh

wilayah Indonesia. Jaringan informasi IPTEK dikembangkan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi, komunikasi, dan komputisasi.

Selain di bawah Bidang IPTEK masalah dokumentasi dan informasi dalam GBHN 1993 juga disebut dalam Bidang Hukum butir Sarana dan Prasarana Hukum :

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara nasional, sebagai unsur pendukung fungsi hukum, perlu dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kaitannya dengan masalah *perpustakaan*, GBHN 1993 menyebutnya juga di dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Yang menarik dan perlu dikaji adalah bahwa GBHN menyiratkan perbedaan antara dokumentasi, informasi dan perpustakaan. Hal ini jelas dari kutipan di atas dengan disebutkan tiga nama tersebut secara eksplisit. Pengembangan unit dokumentasi, informasi dan perpustakaan secara lebih rinci diuraikan dalam Repelita VI, khususnya dalam Bab 45 bagi informasi secara umum dan Bab 39 bagi informasi hukum. Berikut adalah kutipan terpenting dari Repelita VI khususnya yang berhubungan dengan sistem informasi.

Sasaran pengembangan

Sasaran pembangunan informasi pada akhir Repelita VI adalah:

- Terciptanya sistem informasi yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas di seluruh sektor pembangunan.
- Berkembangnya jaringan sistem informasi di berbagai bidang pembangunan seperti bidang ekonomi, iptek, dan *hukum*, serta sektor pendidikan, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa, yang berkemampuan memanfaatkan pusat informasi di dalam dan luar negeri.
- Industri teknologi informasi di dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan akan perangkat keras, perangkat lunak, dan jasa yang dibutuhkan di dalam negeri.

Kebijaksanaan

- Pengembangan penyelenggaraan sistem informasi.
- Peningkatan kemampuan industri teknologi informasi.
- Peningkatan pemanfaatan dan penyebaran informasi.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.
- Pengembangan penataan dan pengelolaan kelembagaan.

Program Pembangunan Sistem Informasi

- *Program pokok* : Program pengembangan sistem informasi dengan kegiatan :
 1. pembakuan struktur, format, dan klasifikasi data;
 2. penataan dan pembentukan himpunan data;
 3. peningkatan program aplikasi;
 4. peningkatan pemanfaatan kuantitas dan kualitas paket aplikasi;
 5. pelaksanaan automasi kantor dan surat elektronik;
 6. pembangunan dan penataan jaringan komunikasi data;
 7. peningkatan kemampuan perolehan informasi interen instansi, antar instansi, antara instansi dan masyarakat, serta antar negara;
 8. peningkatan jangkauan pelayanan seluas mungkin;
 9. peningkatan koordinasi antar simpul dan pembinaan informasi.
- *Program penunjang* :
 10. Program pemasyarakatan sistem informasi
 11. Program pembinaan industri teknologi informasi
 12. Program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
 13. Program pembinaan kelembagaan.

Perlu ditekankan sekali lagi, sasaran pertama pembangunan sistem informasi adalah : terciptanya sistem informasi yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas di seluruh sektor pembangunan. Berarti sistem informasi harus mendukung ke dua-puluh sektor pembangunan yang terdiri dari :

- Sektor industri
- Sektor pertanian dan kehutanan
- Sektor pengairan
- Sektor tenaga kerja

- Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi
- Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika
- Sektor pertambangan dan energi
- Sektor pariwisata, pos, dan telekomunikasi
- Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi
- Sektor lingkungan hidup dan tata ruang
- Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga
- Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera
- Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita anak dan remaja
- Sektor perumahan dan pemukiman
- Sektor agama
- Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi
- Sektor hukum
- Sektor aparaturnegara dan pengawasan
- Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa
- Sektor pertahanan dan keamanan

Perpustakaan sebagai sub sistem dari sistem informasi secara umum dengan sendirinya juga harus dapat mendukung kedua puluh sektor pembangunan di atas secara merata.

Pengembangan perpustakaan juga disebut dalam Repelita VI sebagai program pembinaan perpustakaan. Program pembinaan kepustakaan merupakan program pokok butir c dari sektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. (Repelita VI, Bab 33). Program ini bertujuan untuk mengembangkan minat baca dan minat belajar masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah memantapkan mutu pelayanan sistem nasional perpustakaan sehingga makin mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui pengembangan perpustakaan desa, perpustakaan keliling, perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi, serta perpustakaan lembaga-lembaga lainnya.

Selain itu peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan perpustakaan dilaksanakan melalui jaringan kerja sama lembaga perpustakaan pemerintah baik di pusat maupun daerah. Pengembangan fungsi dan peran perpustakaan daerah dilaksanakan melalui diversifikasi jenis dan layanan perpustakaan dilakukan untuk mengembangkan minat belajar anak-anak dan remaja. Walaupun tidak terinci secara eksplisit namun pengembangan perpustakaan juga diisyaratkan di dalam subsektor pendidikan sebagai sarana pendidikan khususnya dalam upaya perbukuan.

PERSYARATAN SEBAGAI PUSTAKAWAN MASA DEPAN

Sebagai persyaratan pertama bagi pustakawan masa depan tentunya menuntut kesadaran akan tugas dan fungsinya dalam pembangunan nasional Indonesia. Seperti telah diuraikan dimuka bahwa perpustakaan mempunyai fungsi yang sangat jelas dalam program pembangunan khususnya dalam Repelita VI. Tujuan pengembangan perpustakaan dalam masa tersebut sangat lebar cakupannya mulai dari mengembangkan minat baca dan minat belajar masyarakat sampai ke terciptanya sistem informasi yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas di seluruh sektor pembangunan.

Hal tersebut dicapai dengan mengembangkan jaringan sistem informasi di berbagai bidang pembangunan seperti bidang ekonomi, iptek, dan hukum, serta sektor pendidikan, aparaturnegara, penerangan, komunikasi dan media massa, yang berkemampuan memanfaatkan pusat informasi di dalam dan luar negeri. Seiring dengan upaya pengembangan industri teknologi informasi di dalam negeri yang diharapkan sudah mampu memenuhi kebutuhan akan perangkat keras, perangkat lunak, dan jasa yang dibutuhkan di dalam negeri. Sehingga tidaklah berlebihan bahwa syarat pertama untuk dapat menjadi pustakawan masa depan adalah *kesadaran akan tugas dan fungsinya dalam pembangunan nasional Indonesia*.

Peran informasi telah berkembang dari fungsi awal sebagai kebutuhan pengembangan ilmu sampai dengan peran utamanya dalam menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat luas. Perpustakaan sebagai suatu institusi yang mengelola salah satu jenis informasi tentunya juga harus berkembang seiring dengan perkembangan di atas, kalau tidak ingin tersisih dari kancah pembangunan di Indonesia. Pengembangan perpustakaan di Indonesia tidak akan terlepas dari perkembangan arah yang telah ditempuh oleh dunia informasi secara global. Visi baru kepustakawanan perlu dipertimbangkan penerapannya di Indonesia. Visi baru ini adalah (Roberts, 1992):

"new professionals with high-tech skills, ... user orientated; ... they may have some subject affiliation; ... they will not be compartmentalized, as in previous functional arrangements, or fixated on one particular professional discipline, but flexible and redeployable; ... they will be good communicators; and ... they will be entrepreneurial." (Thompson, 1991 p.169)

Profesi dengan ketrampilan teknologi tinggi: hal ini menuntut upaya pelaksana untuk menutup kesenjangan kemampuan yang dimiliki dengan perkembangan teknologi. Aplikasi teknologi informasi merupakan keharusan yang pelaksanaannya perlu direncanakan secara bertahap.

Orientasi ke pihak pemakai : seperti dunia industri, konsepsi inipun juga telah dilaksanakan mulai dengan Total Quality Control (TQC) sampai dengan Total Quality Service (TQS) dan membutuhkan Total Quality Management (TQM) dalam pengelolaannya.

Memiliki kemampuan subyek tertentu: pelaksana yang belum memiliki kemampuan ini perlu diarahkan untuk lebih menguasai sistem informasi, dibanding penguasaannya atas substansi informasi. Pendidikan di bidang perpustakaan mungkin juga harus mengalami orientasi baru.

Tidak terkotak-kotak dalam jenis pekerjaan atau terpaku dengan satu jenis pekerjaan, namun luwes: hal ini menuntut perubahan organisasi "perpustakaan" untuk lebih mengarah kepada organisasi profesional.

Mahir dalam komunikasi dan berperan sebagai entrepreneur : untuk ini perlu dikerjakan lewat pelatihan atau memasukkan topik ini dalam kurikulum pendidikan perpustakaan.

Menyadari keberadaan di dalam lingkungan budaya dan pola hidup bangsa Indonesia, maka persyaratan yang tidak kalah pentingnya bagi pustakawan Indonesia masa depan adalah juga harus selaras dengan budaya dan pola kehidupan bangsa, termasuk dalam menentukan etika kepustakawanan Indonesia.

PENUTUP

Dari apa yang telah diuraikan dapat diterima bahwa peran pustakawan sangatlah strategis dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Dalam hal ini pustakawan Indonesia selayaknya mengembangkan diri untuk dapat melaksanakan tugas tersebut. Filosofi kepustakawanan Indonesia perlu dirumuskan dan disepakati, karena dari filosofi inilah semua kegiatan perpustakaan dapat dijabarkan. Pendidikan dan pelatihan pustakawan harus mengarahkan calon pustakawan ke arah itu. Di sisi lain perkembangan dunia perpustakaan yang didorong oleh aplikasi teknologi informasi perlu diikuti dalam rangka pengembangan perpustakaan di Indonesia. Sehingga teknologi informasi juga merupakan kependaian yang harus dipelajari di pendidikan dan pelatihan perpustakaan.

Kemampuan atas subjek atau disiplin keilmuan tertentu kiranya juga menjadi persyaratan bagi pustakawan masa depan. Upaya penguasaan tersebut perlu dilaksanakan seiring dengan pembinaan karir, setidaknya perlu diupayakan agar pustakawan dalam mengembangkan diri juga mengembangkan kemampuan untuk bekerjasama dengan pihak yang menguasai kemampuan subjek dan disiplin keilmuan tertentu yang terkait dalam bidang tugas instansi di mana dia bekerja. Dan yang terakhir namun sangat menentukan adalah kematangan etika pustakawan Indonesia.

REFERENSI :

- CHEN, CHING-CHIH and Hermon Peter
Information seeking. New York : Neal Schuman, 1982.
- INDONESIA, Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 1994 tentang rencana pembangunan lima tahun keenam (REPELITA VI) 1994/5 - 1998/9. Jakarta, 1994. 6 jilid.
- KETETAPAN-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 1993*. Jakarta : Eko Jaya, 1993.
- ROBERTS, Norman
New model librarians : a question of philosophy? Journal of librarianship and information science. Vol. 24, No.3, 1992.